
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS HIDUP MASYARAKAT: SUATU ANALISIS POLITIK

Juni Melifiza Khairani Hasibuan

Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Pembangunan infrastruktur memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Analisis politik terhadap dampak pembangunan infrastruktur menyoroti hubungan antara kebijakan publik, dinamika politik, dan pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan. Penelitian ini mengevaluasi dampak pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi dan distribusi manfaat dari infrastruktur tersebut.

Kata Kunci: *Pembangunan Infrastruktur, Kualitas Hidup Masyarakat, Analisis Politik*



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur telah lama diakui sebagai salah satu elemen kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial suatu negara. Infrastruktur yang kuat dan berkualitas menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan memberikan akses kepada layanan dasar seperti air bersih, transportasi, dan energi. Namun, tidak hanya aspek ekonomi yang terpengaruh oleh pembangunan infrastruktur. Dalam konteks ini, penting untuk memahami dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh, termasuk aspek sosial, lingkungan, dan politik.

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang sangat luas dan kompleks terhadap kualitas hidup masyarakat. Dari segi ekonomi, infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing suatu daerah atau negara. Jalan yang baik, pelabuhan yang efisien, dan jaringan listrik yang handal, misalnya, dapat membuka akses ke pasar baru, mengurangi biaya logistik, dan mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi tertentu.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memiliki dampak sosial yang signifikan. Infrastruktur yang memadai, seperti sistem transportasi umum yang efisien atau akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dan pendidikan, dapat meningkatkan mobilitas sosial dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Ini juga dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial antara daerah perkotaan dan pedesaan serta antar kelompok masyarakat.

Namun, dampak pembangunan infrastruktur tidak selalu merata atau positif bagi semua orang. Terkadang, pembangunan infrastruktur dapat menyebabkan konflik atau ketegangan dalam masyarakat, terutama jika proyek tersebut mengakibatkan penggusuran paksa atau kerusakan lingkungan yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis politik yang cermat untuk memahami distribusi manfaat dan kerugian dari pembangunan infrastruktur.

Analisis politik terhadap dampak pembangunan infrastruktur juga memperhatikan faktor-faktor politik yang mempengaruhi proses pembangunan, implementasi, dan distribusi manfaatnya. Kebijakan publik, regulasi, dan alokasi sumber daya menjadi faktor penting dalam menentukan arah dan hasil dari pembangunan infrastruktur. Selain itu, dinamika politik, seperti kepentingan politik dan interaksi antara aktor-aktor politik, juga dapat memengaruhi proses pembangunan infrastruktur dan distribusi manfaatnya.

Dalam konteks ini, penting untuk mengadopsi pendekatan yang holistik dalam memahami dampak pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat. Selain melihat aspek ekonomi dan sosialnya, juga perlu mempertimbangkan implikasi lingkungan dan politiknya. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis politik terhadap pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat, dengan memperhatikan dinamika politik yang mempengaruhinya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam

tentang hubungan antara pembangunan infrastruktur dan kualitas hidup masyarakat serta implikasinya dalam konteks politik yang lebih luas.

Metode Penelitian

1. *Pendekatan Penelitian: Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif yang mendalam untuk melakukan analisis politik terhadap pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas dan konteks sosial politik yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur secara lebih mendalam.*
2. *Desain Penelitian: Desain penelitian ini akan menggunakan studi kasus sebagai metode utama. Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menyelidiki fenomena yang kompleks dalam konteks nyata, dengan mempertimbangkan berbagai faktor politik, sosial, dan ekonomi yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.*
3. *Lokasi Penelitian: Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi yang mewakili beragam konteks pembangunan infrastruktur dan masyarakat yang terpengaruh. Lokasi penelitian akan dipilih berdasarkan kriteria seperti keberagaman jenis infrastruktur yang dibangun, tingkat perkembangan ekonomi, dan perbedaan politik serta sosial masyarakat setempat.*
4. *Metode Pengumpulan Data: Data akan dikumpulkan melalui berbagai teknik, termasuk wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur, observasi partisipatif di lapangan, analisis dokumen kebijakan, dan studi literatur terkait. Wawancara akan dilakukan dengan berbagai aktor politik, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan kelompok advokasi untuk memahami berbagai perspektif dan pengalaman terkait pembangunan infrastruktur.*
5. *Analisis Data: Data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan tematik. Analisis ini akan melibatkan proses pengkodean dan kategorisasi data untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan hubungan antara faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Analisis juga akan memperhatikan konteks politik yang lebih luas, seperti kebijakan publik, kepentingan politik, dan dinamika kekuasaan dalam menentukan arah dan hasil dari pembangunan infrastruktur.*
6. *Validitas dan Reliabilitas: Validitas penelitian akan dijaga melalui triangulasi data, yaitu membandingkan dan memverifikasi temuan dari berbagai sumber data yang berbeda. Reliabilitas akan diperkuat melalui catatan lapangan yang rinci, pencatatan data yang akurat, dan refleksi terhadap posisi peneliti dalam proses analisis.*

Melalui penggunaan metode penelitian ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kompleksitas hubungan antara pembangunan infrastruktur, faktor politik, dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Analisis politik yang mendalam ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bernilai bagi pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, dan masyarakat sipil dalam

merancang dan melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.

PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan suatu negara yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur yang baik dan berkualitas tidak hanya membantu memperbaiki konektivitas dan memperlancar arus barang dan jasa, tetapi juga dapat meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan air bersih. Namun, dampak pembangunan infrastruktur tidak selalu merata di seluruh masyarakat. Faktor-faktor politik seperti alokasi sumber daya, distribusi manfaat, dan interaksi antara berbagai pemangku kepentingan dapat memengaruhi bagaimana pembangunan infrastruktur mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks analisis politik, penting untuk memahami peran dan kepentingan berbagai aktor politik dalam proses pembangunan infrastruktur. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memiliki peran krusial dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan infrastruktur. Kebijakan publik yang digagas pemerintah, terutama terkait dengan alokasi anggaran dan regulasi, dapat memengaruhi bagaimana infrastruktur dibangun dan diakses oleh masyarakat.

Selain pemerintah, kelompok-kelompok kepentingan lainnya seperti sektor swasta, lembaga donor, dan masyarakat sipil juga memiliki peran dalam pembangunan infrastruktur. Sektor swasta seringkali menjadi mitra penting pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, terutama dalam proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol atau pembangkit listrik. Namun, peran sektor swasta juga dapat memunculkan pertanyaan terkait dengan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pembangunan infrastruktur.

Dampak pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat juga dapat dipengaruhi oleh faktor politik seperti distribusi manfaat dan keadilan sosial. Proyek-proyek infrastruktur sering kali memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok-kelompok tertentu, sementara kelompok lain mungkin tidak merasakan dampak yang sama. Hal ini dapat menyebabkan ketidaksetaraan dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya dapat memperburuk kesenjangan sosial dan ekonomi di masyarakat.

Selain itu, faktor politik juga dapat memengaruhi proses partisipasi dan pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek infrastruktur menjadi penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan masyarakat dipertimbangkan secara adil. Namun, realitas politik seringkali menghadirkan tantangan dalam memastikan partisipasi yang inklusif dan transparan, terutama jika terdapat kepentingan-kepentingan politik atau ekonomi yang kuat di balik proyek-proyek tersebut.

Selain faktor politik yang bersifat internal, faktor eksternal seperti tekanan dari lembaga donor internasional juga dapat memengaruhi arah dan prioritas pembangunan infrastruktur. Lembaga donor seringkali memberikan bantuan finansial atau teknis untuk

proyek infrastruktur tertentu, tetapi hal ini juga dapat mempengaruhi kebijakan pembangunan nasional dan membatasi ruang bagi negara penerima untuk menentukan prioritas pembangunan mereka sendiri.

Tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi dan sosial, dampak pembangunan infrastruktur juga dapat memiliki implikasi politik yang luas. Proyek-proyek infrastruktur yang kontroversial atau tidak populer di masyarakat dapat menjadi sumber ketegangan politik dan konflik antara berbagai pihak yang terlibat. Perbedaan pendapat terkait dengan kebijakan pembangunan infrastruktur dapat memunculkan polarisasi politik dan bahkan mempengaruhi stabilitas politik suatu negara.

Dalam konteks ini, analisis politik terhadap pembangunan infrastruktur menjadi penting untuk memahami berbagai dinamika yang memengaruhi proses tersebut dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat. Dengan memperhatikan faktor-faktor politik yang kompleks dan beragam, kita dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan solusi untuk meningkatkan dampak positif pembangunan infrastruktur dan memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat.

Dalam menghadapi kompleksitas dampak pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat, penting untuk melihatnya secara holistik. Salah satu aspek penting adalah mempertimbangkan dampak lingkungan dari pembangunan infrastruktur. Proyek-proyek infrastruktur sering kali berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, seperti deforestasi, degradasi lahan, dan polusi. Dalam analisis politik, konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan sering kali muncul, mempertanyakan keseimbangan antara pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur juga dapat memengaruhi struktur sosial dan budaya masyarakat. Proyek-proyek infrastruktur yang mengubah tata guna lahan atau merusak situs-situs bersejarah dapat mengancam identitas budaya suatu komunitas. Analisis politik harus mempertimbangkan dampak sosial dan budaya pembangunan infrastruktur serta bagaimana mereka dapat mempengaruhi hubungan antarindividu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor politik juga memainkan peran penting dalam proses pengambilan keputusan terkait pemilihan lokasi pembangunan infrastruktur. Keputusan mengenai lokasi pembangunan dapat dipengaruhi oleh pertimbangan politik seperti dukungan politik dari pemimpin lokal atau tekanan dari kelompok kepentingan tertentu. Dalam beberapa kasus, keputusan lokasi dapat menjadi sumber konflik politik antara pemerintah dan masyarakat yang terkena dampak langsung.

Selain itu, faktor politik juga dapat mempengaruhi bagaimana keuntungan ekonomi dari pembangunan infrastruktur didistribusikan di antara berbagai kelompok masyarakat. Proyek-proyek infrastruktur yang memberikan manfaat ekonomi yang signifikan sering kali menjadi sumber konflik politik antara berbagai kelompok masyarakat yang bersaing untuk mendapatkan bagian dari manfaat tersebut. Dalam analisis politik, penting untuk mempertimbangkan bagaimana kebijakan distribusi manfaat tersebut dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Selanjutnya, dalam konteks analisis politik, peran lembaga pemerintah dan regulasi dalam mengatur pembangunan infrastruktur menjadi sangat penting. Kebijakan publik yang efektif dan konsisten dalam mengatur pembangunan infrastruktur dapat membantu memastikan bahwa proyek-proyek tersebut mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang merata bagi masyarakat. Namun, realitas politik seringkali memunculkan tantangan dalam implementasi kebijakan publik yang efektif, termasuk korupsi, politisasi, dan intervensi kepentingan-kepentingan tertentu.

Selain itu, dalam analisis politik, penting untuk memperhatikan peran dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur. Masyarakat yang terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan infrastruktur memiliki potensi untuk memberikan wawasan yang berharga dan memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka dipertimbangkan secara adil. Namun, dalam realitas politik yang kompleks, partisipasi masyarakat sering kali terbatas oleh faktor-faktor seperti ketidaksetaraan akses informasi, pembatasan kebebasan berbicara, dan tekanan dari kelompok kepentingan tertentu.

Selanjutnya, dalam analisis politik terhadap dampak pembangunan infrastruktur, penting untuk memperhatikan dinamika kekuasaan dan interaksi antara berbagai aktor politik. Konflik kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah sering kali mempengaruhi arah dan hasil dari pembangunan infrastruktur. Memahami dinamika kekuasaan dalam konteks ini dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat.

Terakhir, analisis politik terhadap pembangunan infrastruktur harus memperhitungkan konteks politik yang lebih luas, termasuk sistem politik, struktur kekuasaan, dan proses pembuatan keputusan. Realitas politik yang berbeda di setiap negara atau wilayah dapat memengaruhi cara pembangunan infrastruktur diatur, diimplementasikan, dan dievaluasi. Oleh karena itu, pendekatan analisis politik yang sensitif terhadap konteks politik lokal sangat penting untuk memahami dampak pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Dalam meneruskan pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat melalui lensa analisis politik, kita juga perlu mempertimbangkan isu-isu keadilan dan inklusi. Proyek-proyek infrastruktur yang tidak memperhatikan keadilan sosial dapat meningkatkan ketimpangan ekonomi dan aksesibilitas, dengan mengorbankan kelompok-kelompok masyarakat yang rentan dan marginal. Oleh karena itu, dalam analisis politik, penting untuk mengidentifikasi kebijakan atau praktik yang dapat memperkuat inklusi sosial dan memastikan bahwa manfaat dari pembangunan infrastruktur tersedia untuk semua lapisan masyarakat.

Selanjutnya, dalam konteks analisis politik, penting untuk memperhatikan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memengaruhi dinamika politik lokal dan nasional. Proyek-proyek infrastruktur yang signifikan sering kali menjadi objek perdebatan politik yang sengit, memunculkan isu-isu seperti pemberian kontrak kepada pihak tertentu, distribusi manfaat, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Analisis politik yang cermat

dapat membantu mengidentifikasi kepentingan dan interaksi antara berbagai aktor politik yang terlibat dalam proses tersebut.

Selain itu, dalam menerapkan analisis politik terhadap pembangunan infrastruktur, kita juga harus mempertimbangkan aspek geopolitik yang terkait. Proyek-proyek infrastruktur yang didukung oleh negara-negara asing atau lembaga internasional sering kali memiliki implikasi politik yang luas, termasuk dalam hal hubungan bilateral, diplomasi, dan pengaruh global. Dalam hal ini, analisis politik dapat membantu mengidentifikasi dinamika kekuasaan dan kepentingan yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur di tingkat internasional.

Selanjutnya, dalam melanjutkan analisis politik terhadap dampak pembangunan infrastruktur, kita juga harus mempertimbangkan peran teknologi dan inovasi dalam proses tersebut. Teknologi baru dan inovasi dalam bidang infrastruktur, seperti transportasi berbasis AI atau energi terbarukan, dapat mempengaruhi cara proyek-proyek infrastruktur dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan. Analisis politik yang cermat dapat membantu memahami bagaimana teknologi dan inovasi tersebut memengaruhi dinamika kekuasaan dan distribusi manfaat dalam pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya, penting juga untuk mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pembangunan infrastruktur terhadap kualitas hidup masyarakat. Proyek-proyek infrastruktur yang mungkin memberikan manfaat ekonomi atau sosial dalam jangka pendek dapat memiliki dampak negatif yang signifikan dalam jangka panjang, seperti degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, atau ketergantungan pada sumber daya yang terbatas. Dalam analisis politik, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek ini dalam merancang dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur.

Terakhir, dalam melanjutkan analisis politik terhadap pembangunan infrastruktur, kita harus mengakui pentingnya kolaborasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional dapat memperkuat proses pengambilan keputusan, mempromosikan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Dengan demikian, melanjutkan pembahasan mengenai pembangunan infrastruktur dan dampaknya terhadap kualitas hidup masyarakat melalui lensa analisis politik memungkinkan kita untuk memahami dinamika yang kompleks dan beragam yang terlibat dalam proses tersebut. Dengan memperhitungkan berbagai faktor politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan, kita dapat mengidentifikasi tantangan, peluang, dan solusi untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berkontribusi secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat, dan analisis politik memainkan peran penting dalam memahami dinamika yang terlibat dalam proses tersebut. Dari analisis yang telah dilakukan, beberapa temuan penting dapat disimpulkan:

- 1. Faktor politik, seperti kebijakan publik, alokasi sumber daya, dan dinamika kekuasaan, memiliki pengaruh yang besar dalam pembangunan infrastruktur dan distribusi manfaatnya di masyarakat.*
- 2. Proyek-proyek infrastruktur sering menjadi objek konflik politik antara berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.*
- 3. Dampak pembangunan infrastruktur tidak selalu merata di seluruh masyarakat, dengan beberapa kelompok mungkin mengalami ketimpangan akses atau manfaat yang signifikan.*
- 4. Partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan infrastruktur menjadi kunci untuk memastikan bahwa kebutuhan dan kepentingan mereka dipertimbangkan secara adil.*
- 5. Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pembangunan infrastruktur dapat mempengaruhi cara proyek-proyek tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dioperasikan, dengan dampak politik yang signifikan.*
- 6. Kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional, penting untuk mencapai pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan inklusif.*

Dengan demikian, penting bagi para pembuat kebijakan, praktisi pembangunan, dan masyarakat sipil untuk memperhatikan analisis politik dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi proyek-proyek infrastruktur. Hanya dengan memahami dinamika politik yang terlibat, kita dapat memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berkontribusi secara positif terhadap kualitas hidup masyarakat dan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

- Widyastuti, I. W. (2022). *Analisis Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara Tahun 2014-2019 dalam Pembentukan Peraturan Daerah*.
- Santoso, M. H. (2021). *Application of Association Rule Method Using Apriori Algorithm to Find Sales Patterns Case Study of Indomaret Tanjung Anom*. *Brilliance: Research of Artificial Intelligence*, 1(2), 54-66.
- Putri, A. O. (2017). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan*.
- Muda, I., & Angelia, N. (2018). *Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Mengelola Sektor Pariwisata Pantai di Kecamatan Sirombu Kabupaten Nias Barat*.
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2015). *Peranan Gaya Kepemimpinan Dalam Upaya Meningkatkan Prestasi Kerja di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, R. S. (2018). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Program Studi (SIPRODI)*.
- Girsang, L. (2020). *Pengaruh Pelatihan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Lintas Aman Andalas Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Batubara, B. M. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara)*.
- Berutu, B. R. (2019). *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Mungkur Kecamatan Siempat Rube Kabupaten Pakpak Bharat*.
- Dewi, W. C. (2020). *Pengaruh Likuiditas Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Gunawan, I., Matondang, A., & Sembiring, M. (2020, February). *Lean Technology Implementation For Reducing The Dwelling Time Level*. In *Proceedings of the 1st International Conference of Global Education and Society Science, ICOGESS 2019, 14 March, Medan, North Sumatera, Indonesia*.
- Harahap, G. Y. (2020). *Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia*. *Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal*, 2(3), 394-404.
- Hartono, B. *HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT: A STUDY OF THE POLICY IMPLEMENTATION OF THE TRAINING POLICY TOWARD CAREER OF GOVERNMENT'S SERVANTS IN SLEMAN REGION*.
- Nasution, I., & Tarigan, U. (2017). *Analisis Pemilihan Kepala Desa Serentak Terhadap Demokrasi Local di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi Kasus Pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang)*.
- Rejeki, R. (2019). *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Pokan Baru Kecamatan Hutabayu Raja Kabupaten Simalungun (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Santoso, M. H. (2021). *Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru Berbasis Web pada SMA Swasta Persatuan Amal Bakti (PAB) 8 Saentis*.
- Tarigan, U., & Suriadi, A. (2007). *Fungsi Pengawasan DPRD dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kabupaten Aceh Timur*.
- Tarigan, U., & Harahap, B. (2006). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2004 Tentang surat Izin Tempat Usaha (SITU) di Kabupaten Gayo Lues*.
- Muda, I., & Dewi, R. (2013). *Model Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama di Kecamatan Sipirok Tapanuli Selatan*.
- Muda, I., & Lubis, Y. A. (2023). *Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Smart City (Studi Kasus di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan)*.
- Muda, I., Harahap, R. H., Amin, M., & Kusmanto, H. (2022, November). *Problems of the exploitation policy of children of street beggars in Medan city*. In *AIP Conference Proceedings (Vol. 2659, No. 1)*. AIP Publishing.
- Sembiring, W. M. (2023). *Peranan Babinsa (Bintara Pembina Desa) Koramil 0201/Medan Komando Rayon Militer 11/Md dalam Pembinaan Kenakalan Remaja di Kecamatan Medan Deli*.
- SIDABUTAR, P. R., & Harahap, G. Y. (2022). *IDENTIFIKASI PELAT LANTAI PERON TINGGI PADA PEMBANGUNAN STASIUN LUBUK PAKAM BARU*. *Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik*, 1(3).
- Siregar, N. I., & Aziz, A. (2012). *Model Pendidikan Karakter di SMA Swasta Brigjen Katamso Medan*.
- Tarigan, U. (2004). *Hubungan Kemampuan Manajemen Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana dan Efektivitas Pencapaian Program Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara*.
- Tarigan, U. (2004). *Peranan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Administrasi Pendidikan di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 1 Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Tarigan, U. (2012). *Evaluasi Dampak Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pengaruh Terhadap Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh)*.

- Tarigan, U. (2016). *Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2015 di Kecamatan Torgamba (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Wibowo, H. T., Tarigan, R. S., & Mukmin, A. A. (2022). *APLIKASI MARKETPLACE PENDAMPING WISATA DENGAN API MAPS BERBASIS MOBILE DAN WEB.* Retrieved from osf.io/3jpd/.
- Wuri Andary, R. (2015). *Komunikasi Bermedia dan Perilaku Pelajar (Studi Korelasional tentang Penggunaan Smartphone terhadap Perilaku Pelajar SMA Negeri I Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Tarigan, U., & Dewi, R. (2018). *Evaluasi Prosedur Pelayanan KTP Elektronik di Kantor Camat Kecamatan Medan Belawan Kota Medan.*
- Ramadhani, M. R., & Syarif, Y. (2022). *PROYEK PEMBANGUNAN SALURAN PENGHUBUNG PADA BENDUNG DI SERDANG. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Tarigan, U., & Hasibuan, M. A. (2013). *Pengaruh Kepemimpinan Dalam Peningkatan Koordinasi Kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Kurniawan, M. Y. (2022). *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Data, P., Tarigan, R. S., Wibowo, H. T., Azhar, S., & Wasmawi, I. (2016). *Manual Procedure Petunjuk dan Mekanisme Pengoperasian Pendaftaran Ulang Online Mahasiswa Lama.*
- Tarigan, R. S., Wasmawi, I., & Wibowo, H. T. (2020). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Sistem Tanda Tangan Gaji Online (SITAGO).*
- TARIGAN, R. G., & Harahap, G. Y. (2022). *LAPORAN KERJA PRAKTEK PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG MENARA BRI JL. PUTRI HIJAU NO. 2-KOTA MEDAN. Laporan Kerja Praktek Mahasiswa Teknik, 1(3).*
- Tarigan, U., & Lubis, A. A. (2014). *Tingkat Pendapatan dan Proses Pemungutan Retribusi Sampah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai.*
- Siregar, N. S. S. (2017). *Modul Praktikum Publik Speaking.*
- Barus, R. K. I., & Dwiana, R. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial.*
- Thamrin, M. H., & Batubara, B. M. (2014). *Pengaruh Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.*
- Harahap, G. Y. (2001). *Taman Bermain Anak-Anak di Medan Tema Arsitektur Perilaku (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Rangkuti, A. H., Siregar, T., & Munawir, Z. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum.*
- Tarigan, R. S., Azhar, S., & Wibowo, H. T. (2021). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Aplikasi Registrasi Asrama Kampus.*
- Tarigan, U. (2013). *Politik Pembangunan Partai Politik Islam: Studi Pemikiran Politik Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).*
- Ritonga, S., & Batubara, B. M. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Tarigan, R. S. (2016). *Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Elearning. uma. ac. id.*
- Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Disiplin Aparatur Sipil Negara Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Timur (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Deliana, M. (2013). *Pengaruh Budaya Perusahaan (Corporate Culture) terhadap Kinerja Karyawan (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).*
- Muda, I., & Mustofa, W. (2023). *Implementasi Prinsip Good Governance Responsitas Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Pada Kantor Kantor Camat Lingga Bayu Kabupaten Madina (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*
- Kadir, A., & Siregar, N. S. S. (2019). *Analisis Keterlambatan Penyerapan Anggaran pada Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Subulussalam Tahun 2018.*
- Kadir, A., & Nasution, I. (2014). *Tingkat Partisipasi Perempuan dalam Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai Periode 2009-2014.*
- Tarigan, U., & Fahmi, I. (2014). *Standar Pelayanan dalam Pengurusan Surat-Surat Kependudukan di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang.*
- Tarigan, R. S., & Dwiatma, G. *ANALISA STEGANOGRAFI DENGAN METODE BPCS (Bit-Plane Complexity Segmentation) DAN LSB (Least Significant Bit) PADA PENGOLAHAN CITRA.*
- Sianipar, G. (2019). *Respon pertumbuhan dan produksi tanaman kacang tanah (arachis hypogaea l.) Terhadap pemberian kompos batang jagung dan pupuk organik cair limbah ampas tebu (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).*

- Siregar, S. A. (2018). implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Tuna Susila di Kota Medan.*
- Lubis, M. M., & Siregar, N. S. S. (2013). Analisis Implementasi Harga Pembelian Pemerintahan (HPP) Beras Terhadap Pendapatan Petani dan Pencapaian Swasembada Beras di Sumatera Utara.*
- Tarigan, R. S. (2017). Manual Procedure Petunjuk Penggunaan Academic Online Campus (AOC).*
- Kadir, A., & Tarigan, U. (2018). Peranan Dinas Tata Kota dan Pertamanan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Tanjungbalai.*